

**EVALUASI KEMAMPUAN SEKOLAH MENGGALI DANA DARI MASYARAKAT
UNTUK PENINGKATAN KUALITAS PEMBELAJARAN
DI SMPN 7 BANDAR LAMPUNG**

Oleh: Nurmaini, Sulton Djasmi, Irawan Suntoro
FKIP Unila, Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung
e-mail: smpn7bd@gmail.com
082183250784

Abstract : School Ability Evaluation In Exploring Funds From Society In An Effort To Improve The Quality Of Education In State Juniiior High School 7 Bandar Lampung. This research was conducted in State Junior High School 7 Bandar Lampung, the research was focused on school ability to explore funds from society in an effort to improve the quality of education. The method of this research was evaluative, data was gained by observation, questionnaire and interview analyzed by quantitative descriptive. The result of this research were (1) effort in exploring funds need to be improved from school committee, city education department, province education department, and from state revenues and expenditures budget or central education department.. (2) Management of assistance was not maximum because of the participation of society in a way to participate is less varying. (3) Learning Quality in State Junior High School 7 Bandar Lampung is not maximum it can be seen from the learning process is still dominated by the teacher.

Key word: school ability, exploring funds, increasing learning quality

Abstrak : Evaluasi Kemampuan Sekolah Menggali Dana Dari Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Pembelajaran Di SMPN 7 Bandar Lampung . Penelitian ini dilaksanakan di SMP N 7 Bandarlampung, fokus penelitian ini ialah kemampuan sekolah menggali dana dari masyarakat dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluativ. Data dikumpulkan dengan observasi, angket, dan wawancara dianalisis dengan program Seri Program Statistik (SPSS-21). Menu yang digunakan yaitu *Items analysis-validity*. Kesimpulan hasil penelitian ini (1) Upaya penggalan dana perlu ditingkatkan baik dari Komite Sekolah, Dinas Pendidikan Kota, Dinas Pendidikan Propinsi maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Departemen Pendidikan Pusat. (2) Pengelolaan bantuan belum maksimal karena partisipasi masyarakat dalam cara berpartisipasi adalah kurang bervariasi. (3) Kualitas pembelajaran di SMP N 7 Bandarlampung belum maksimal hal ini terlihat proses pembelajaran masih didominasi oleh guru.

Kata Kunci: pengelolaan bantuan, kualitas pembelajaran

PENDAHULUAN

Pendidikan di Indonesia saat ini tidak terlepas dari masalah dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan persoalan yang paling mendasar yang dihadapi dunia pendidikan saat ini adalah peningkatan mutu pendidikan. Hal ini timbul karena semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam pendidikan. Dengan demikian, sekolah sebagai lembaga pendidikan formal mempunyai tugas dalam memenuhi harapan masyarakat untuk selalu meningkatkan mutu pendidikan.

Pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk generasi penerus bangsa yang cerdas dan handal dalam pelaksanaan pembangunan kehidupan bangsa. Sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pada pasal 3 menyatakan bahwa:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Memperhatikan isi UU No. 20 tahun 2003 tersebut maka dapat dipastikan kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh keberhasilan pendidikan bangsa itu sendiri. Pendidikan menuntut pada pihak-pihak yang terlibat didalamnya untuk berperan serta dalam pencapaian hasil pendidikan yang optimal. Salah satu diantaranya adalah guru sebagai pihak yang berperan dalam terciptanya proses pembelajaran yang menarik dan bermutu baik. Penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, keuangan dan pembiayaan merupakan faktor yang sangat menentukan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam peningkatan mutu pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar-mengajar di sekolah bersama dengan komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya, baik itu disadari

maupun yang tidak disadari. Komponen keuangan dan pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

SMP N 7 Bandar Lampung merupakan salah satu sekolah menengah pertama yang negeri di Bandar Lampung.

Sekolah ini dari tahun ke tahun diharapkan mampu meningkatkan mutunya. Keberhasilan ini tentu saja tergantung dari keberhasilan kegiatan belajar mengajar yang merupakan keterpaduan dari komponen pendidikan baik yang merupakan masukan instrumental, yaitu kurikulum, tenaga, sarana dan prasarana, sistem pengelolaan maupun masukan yang berkenaan dengan faktor lingkungan. Dari komponen tersebut sarana pendidikan yang antara lain sarana prasarana fisik sekolah merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Sekolah yang mandiri

atau berdaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut; tingkat kemandirian tinggi/tingkat ketergantungan rendah; bersifat adaptif dan ansipatif/proaktif sekaligus; memiliki jiwa kewirausahaan tinggi (ulet, inovatif, gigih, berani mengambil resiko, dan sebagainya; bertanggung jawab terhadap kinerja sekolah; memiliki kontrol yang kuat terhadap kondisi kerja; komitmen yang tinggi pada dirinya; dan prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya. Selanjutnya, bagi sumberdaya manusia sekolah yang berdaya, pada umumnya, memiliki ciri-ciri pekerjaan adalah miliknya, dia bertanggung jawab, pekerjaan memiliki kontribusi, dia tahu posisinya dimana, dia memiliki kontrol terhadap pekerjaan, dan pekerjaannya merupakan bagian hidupnya.

Pengelolaan keuangan, terutama pengelokasian/penggunaan uang sudah sepantasnya dilakukan oleh sekolah. Hal ini juga didasari oleh kenyataan bahwa sekolahlah yang paling memahami kebutuhannya sehingga desentralisasi

pengalokasian/penggunaan uang sudah seharusnya dilimpahkan ke sekolah. Sekolah juga harus diberi kebebasan untuk melakukan “kegiatan-kegiatan yang mendatangkan penghasilan” (*income generating activities*), sehingga sumber keuangan tidak semata-mata tergantung pada pemerintah, bahwa pendidikan merupakan kunci kemajuan, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat/bangsa, maka akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas masyarakat/bangsa tersebut.

Pemikiran ini dalam perjalanannya disebut Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi pada sekolah untuk menentukan kebijakan sekolah dalam rangka meningkatkan mutu, efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara sekolah, masyarakat dan pemerintah.

Pemahaman konsep dasar evaluasi, akan dibahas pengertian evaluasi. Pohan dalam Zamroni (2000:34) mengatakan *evaluation is the process of delincating, obtaining, and providing useful information for judging decision alternatives*. Dalam pengertian ini evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Pendapat lain, Suharsimi Arikunto (2002:2) bahwa evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Suchman (1961) dalam Suharsimi Arikunto (2002:1) memandang evaluasi sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan. Menurut Suharsimi Arikunto, (2002:18) menjelaskan

evaluasi adalah upaya untuk mengetahui tingkat keterlaksanaan suatu kebijakan secara cermat dengan cara mengetahui efektifitas masing-masing komponennya.

Dari beberapa pendapat di atas, peneliti berpijak pendapat (Zamroni, 2000:13) bahwa evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan pemberian informasi yang sangat bermanfaat bagi pengambil keputusan dalam menentukan alternatif keputusan. Evaluasi merupakan kegiatan menelaah bukan untuk membuktikan tetapi untuk memperbaiki yang berkaitan dengan empat jenis penilaian yaitu konteks, input, proses, dan produk .

Organisasi Belajar

Perlunya organisasi belajar sudah disadari sejak tahun delapan puluhan, akan tetapi baru pada tahun sembilanpuluhan, istilah organisasi belajar (*learning organization*) dipopulerkan oleh Senge dalam bukunya *The Fifth Disciplin*. Menurut Senge (1990:3), organisasi belajar adalah “... *organizations where people continually expand their capacity to create the results*

they truly desire, where new and expansive patterns of thinking are nurtured, where collective aspiration is set free, and where people are continually learning to see the whole together.” Pendapat Senge itu menunjukkan bahwa organisasi merupakan tempat orang secara terus menerus memperluas kemampuan untuk mewujudkan apa yang sesungguhnya mereka inginkan, tempat pola-pola berpikir yang baru dan ekspansif dikembangkan, tempat mencurahkan secara bebas aspirasi kolektif, dan tempat orang secara terus menerus belajar melihat keseluruhan secara bersama-sama. Tidak jauh berbeda dari yang dikemukakan Marquardt,M.J.(2002:188) mendefinisikan organisasi belajar adalah “... *an organization which learns powerfully and collectively and is continually transforming itself to better collect, manage, and use knowledge for corporate success.*”

Desentralisasi Pendidikan

Berlakunya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya memberi kewenangan dan keleluasaan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan diberikan kepada daerah kabupaten dan kota berdasarkan azas desentralisasi dalam wujud otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Berkaitan dengan aspirasi masyarakat, ditegaskan pula bahwa daerah dibentuk berdasarkan kehendak masyarakat setempat dengan mempersyaratkan kemampuan ekonomi, potensi daerah, jumlah penduduk, luas daerah dan berbagai syarat lain yang memungkinkan daerah menyelenggarakan otonomi daerah (Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 UU No. 32 Tahun 2004).

Kualitas Pendidikan

Berkaitan dengan kajian sekolah yang bermutu, Syafaruddin (2008:180) mengidentifikasi karakteristik sekolah yang bermutu yang dapat diterapkan di Indonesia yaitu : 1) lingkungan sekolah yang aman dan tertib, 2) perumusan visi, misi, target mutu yang jelas, 3) kepemimpinan sekolah yang kuat, 4) harapan prestasi yang tinggi, 5) pengembangan staf sekolah yang terus menerus, 6) evaluasi belajar untuk penyempurnaan proses pembelajaran, 7) komunikasi dan dukungan orang tua dan masyarakat, 8) komitmen seluruh warga sekolah akan pentingnya peningkatan mutu.

Marquardt, M.J dalam Syafaruddin (2008:180) karakteristik sekolah bermutu meliputi : 1) kepala sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, 2) harapan yang tinggi terhadap prestasi, 3) menekankan pada keterampilan dasar, 4) keteraturan dan atmosfer terkendali, dan 5) seringnya penilaian terhadap prestasi pelajar. Montimor dalam (Syafaruddin, 2008:181),

karakteristik sekolah bermutu : 1) kepemimpinan kepala sekolah bermakna terhadap warga sekolah, kepala sekolah memahami kebutuhan sekolah, aktivitas dalam sekolah dilakukan pembagian kekausaan, dan pengambilan keputusan melibatkan warga sekolah, 2) melibatkan wakil kepala sekolah dalam pengambilan kebijakan dan peningkatan kemajuan siswa, 3) melibatkan guru dalam perencanaan kurikulum dan pengembangan kurikulum, 4)sekolah memiliki atmosfir menyenangkan dan etos kerja yang positif.

Tujuan penelitian ini adalah menilai dan memberikan rekomendasi tentang:

1. paya penggalan dana dari pemerintah dan masyarakat dalam mendukung kualitas pembelajaran di SMPN 7 Bandarlampung
2. Pengelolaan bantuan pendidikan yang diperoleh di SMP N 7 Bandarlampung
3. Kualitas pembelajaran di SMP N 7 Bandarlampung

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah evaluative, jenis penelitian ini digunakan karena penelitian mengkaji dan mengevaluasi keterlaksanaan program manajemen pendidikan berbasis sekolah yang dilaksanakan pada SMP N 7 Bandarlampung, meliputi; otonomi pendidikan yang diterapkan di SMP N 7 Bandarlampung yaitu manajemen berbasis sekolah, bantuan yang diterima dalam penyelenggaraan otonomi pendidikan dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah dalam hal ini bersumber dari pemerintah dan masyarakat atau orang tua siswa, pelaksanaan penerapan MBS di SMP N 7 Bandarlampung meliputi sumber bantuan, transparansi pengelolaannya dan akuntabilitas publik, sampai pada kualitas pembelajaran yang baik di SMP N 7 Bandarlampung Bandar Lampung.

HASIL PENELITIAN

4.1 Upaya Penggalan Dana

Program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMP Negeri 7 Bandar Lampung dari tahun 2009 hingga 2014, dalam pelaksanaannya dibiayai oleh berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut adalah dari Komite Sekolah, Dinas Pendidikan Kota, Dinas Pendidikan Propinsi maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Departemen Pendidikan Pusat. Lain halnya dengan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 2010 nampak jelas bahwa kegiatan yang dilaksanakan adalah dalam rangka memenuhi standar Sekolah Standar Nasional. Hal ini terlihat dari adanya kegiatan pembelian laptop dan *LCD Projector*.

Seperti kita ketahui bahwa standar dalam Sekolah Standar Nasional adalah adanya *LCD Projector* dan laptop dalam kegiatan belajar mengajar di kelas. Namun

demikian nampaknya kegiatan ini harus dilakukan lagi mengingat kondisi nyata yang ada belum semua kelas menggunakan fasilitas *ICT* ini dalam proses belajar mengajar. Selain fasilitas *ICT* dalam pembelajaran di kelas, program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan yang dilaksanakan pada tahun 2010 adalah untuk melengkapi kebutuhan perpustakaan. Dalam standar sekolah Nasional, perpustakaan harus memiliki buku teks dalam bentuk cetak atau digital untuk setiap mata pelajaran minimal sama dengan jumlah siswa dalam 1 kelas dan memiliki 5 judul buku referensi baik cetak maupun digital sebagai penunjang buku teks untuk setiap mata pelajaran. Apabila kita lihat sumber pendanaan yang dilaksanakan pada program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan pada tahun 2009, ternyata sebagian besar sumber dana tersebut berasal dari APBN.

Hal ini menandakan bahwa konsekuensi dari penunjukan SMP Negeri 7 Bandar Lampung sebagai sekolah berkualitas

tersebut, diketahui bahwa Komite Sekolah juga memberikan peranannya dalam mendukung keterlaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan. Ini berarti bahwa peran Komite Sekolah sebenarnya hanya mencukupi kekurangan dana yang ada dan bukannya sebagai sumber pendanaan yang utama dalam program tersebut.

4.2 Pengelolaan Bantuan

Pelibatan masyarakat dalam pendidikan adalah dengan memberikan sumber daya yang ada. Hal ini berarti bahwa dukungan tersebut bersifat luas, karena tidak hanya berupa pendanaan saja. Bentuk-bentuk partisipasi dapat diwadahi dengan cara menyumbang uang, menyumbang barang, menyumbang tenaga, menyumbang usulan/gagasan dan bentuk lainnya yang berupa gabungan dari bentuk-bentuk yang disebutkan di atas. Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi dari jawaban responden, diketahui bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam cara

berpartisipasi adalah kurang bervariasi karena dari kelima jawaban hanya tiga jawaban yang menjadi pilihan responden. Sebanyak 6 (enam) responden memilih bentuk partisipasi mereka dengan cara menyumbang uang. Jumlah ini berarti mencapai 29 % dari seluruh responden. Selanjutnya 52 % dari semua responden, yaitu sejumlah 11 orang memilih bentuk partisipasi menyumbang usulan/gagasan sebagai cara berpartisipasi mereka.

Ini berarti sebagian besar responden atau lebih dari separuh responden memberikan sumbangan usulan/gagasan. Bentuk ini adalah bentuk termudah dari bentuk-bentuk lainnya. Namun demikian dengan ikut memberikan usulan berarti ada rasa tanggung jawab dari masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sekolah.

4.3 Kualitas Pembelajaran

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran adalah variabel guru. Guru mempunyai pengaruh yang cukup dominan terhadap kualitas

pembelajaran, karena gurulah yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran di kelas, bahkan sebagai penyelenggara pendidikan disekolah. Berdasarkan hasil penelitian yang selama ini dilaksanakan, kompetensi guru SMP N 7 Bandar Lampung sudah dianggap:

- a) Menguasai bidang studi atau bahan ajar dengan baik
- b) Memahami karakteristik peserta didik secara komprehensif
- c) Menguasai pengelolaan pembelajaran dengan baik
- d) Menguasai metode dan strategi pembelajaran dengan inovatif
- e) Menguasai penilaian hasil belajar siswa secara cermat
- f) Memiliki kepribadian dan wawasan pengembangan profesi

Dalam melaksanakan tugasnya, guru sudah dapat berfungsi sebagai pengajar, pelatih, pembimbing, dan sebagai professional (Ketentuan Umum pasal 1, Undang - Undang Guru dan Dosen). Untuk menilai kinerja guru di sini, dapat dilihat dari cara

mereka melaksanakan tugas di dalam kelas, mengembangkan karier profesionalnya, dan hasil karya mereka, baik mereka sebagai guru maupun sebagai professional di bidang pendidikan. Karya guru ditunjukkan karya ilmiah, seperti hasil penelitian, buku bahan ajar, artikel dalam majalah maupun jurnal ilmiah dan juga karya lain seperti teknologi pembelajaran, alat peraga dalam pembelajaran dan sebagainya.

Secara umum guru di SMP N 7 Bandar Lampung memiliki kompetensi yang memadai sebagaimana yang distandarkan pemerintah. Guru-guru bahkan aktif dalam berbagai kegiatan organisasi profesi seperti PGRI, MSI dan MGMP. Berdasarkan observasi dan suvervisi di dalam kelas, penguasaan materi pelajaran sudah cukup memadai. Begitu pula dengan keterampilan didaktik metodik sudah menunjukkan adanya inovasi pembelajaran yang sudah melibatkan siswa secara aktif dan kreatif, sehingga pembelajaran cukup impresif. Guru memiliki inisiatif untuk

menyampaikan materi pelajaran yang masih bersifat kontroversif, dengan berbagai metode seperti aktif debat sehingga tidak selalu terpaku pada paradigma pemerintah. Disamping itu, guru memiliki keberanian untuk menyampaikan fakta apa adanya, dan selanjutnya ada upaya penanaman makna dan nilai yang bermanfaat bagi para siswa. Karena memang pada dasarnya, siswa dapat belajar tidak saja pada peristiwa-peristiwa yang baik, melainkan dapat pula pada peristiwa buruk, yang diambil manfaatnya bagi kehidupannya. Dalam kegiatan pembelajaran, guru telah menerapkan berbagai metode pembelajaran secara dinamis seperti metode ceramah bervariasi, diskusi, pembelajaran luar kelas atau wisata, sampai pembelajaran berbasis proyek. Mulai tampak perubahan paradigma pembelajaran yang semula berbasis pada guru sekarang menjadi pembelajaran berbasis pada siswa. Dalam membuat perencanaan juga guru telah menerapkan

penyusunan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang terarah dan memiliki tingkat kesesuaian tinggi dengan pelaksanaannya. Guru juga aktif dalam mengembangkan diri terutama mengembangkan profesionalitas melalui MGMP, MSI, PGRI dan organisasi profesi lain. Begitu pula guru memberi akses yang luas untuk berkonsultasi di luar pembelajaran. Terkait dengan media pembelajaran, guru juga telah menggunakan media yang dapat membantu kegiatan pembelajaran seperti OHP, Peta, gambar dan lain sebagainya.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan data-data di lapangan yang dikumpulkan selama penelitian serta berdasarkan dari hasil analisis, maka dapat diambil beberapa kesimpulan mengenai evaluasi kemampuan sekolah menggalang dana dari masyarakat untuk peningkatan mutu pembelajaran di SMP Negeri 7 Bandar Lampung. Adapun kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Upaya Penggalian Dana

Program-program yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan di SMP Negeri 7 Bandar Lampung dari tahun 2009 hingga 2014, dalam pelaksanaannya dibiayai oleh berbagai sumber. Perlunya bantuan dari berbagai sumber dari Komite Sekolah, Dinas Pendidikan Kota, Dinas Pendidikan Propinsi maupun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Departemen Pendidikan Pusat.

2. Pengelolaan Bantuan

Komponen proses dalam penelitian ini menggambarkan kinerja sekolahan melaksanakan otonomi pendidikan dalam rangka pelaksanaan Manajemen Berbasis sekolah. Sebagai responden adalah Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, 1 Orang Guru, 4 orang tua siswa. Pelibatan masyarakat dalam pendidikan adalah dengan memberikan sumber daya yang ada.

Hal ini berarti bahwa dukungan tersebut bersifat luas, karena tidak hanya berupa pendanaan saja. Bentuk-bentuk partisipasi dapat diwadahi dengan cara menyumbang uang, menyumbang barang, menyumbang tenaga, menyumbang usulan/gagasan dan bentuk lainnya yang berupa gabungan dari bentuk-bentuk yang disebutkan di atas. Berdasarkan hasil perhitungan frekuensi dari jawaban responden, diketahui bahwa bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam cara berpartisipasi adalah kurang bervariasi karena dari kelima jawaban hanya tiga jawaban yang menjadi pilihan responden. Sebanyak 6 (enam) responden memilih bentuk partisipasi mereka dengan cara menyumbang uang. Jumlah ini berarti mencapai 29 % dari seluruh responden. Selanjutnya 52 % dari semua responden, yaitu sejumlah 11 orang memilih bentuk partisipasi menyumbang

usulan/gagasan sebagai cara berpartisipasi mereka.

professional (Ketentuan Umum pasal 1, Undang - Undang Guru dan Dosen).

3. Kualitas Pembelajaran

Komponen hasil dalam penelitian ini menggambarkan kualitas pembelajaran yang baik diterapkan di SMP N 7 Bandarlampung. Analisis kualitas pembelajaran di SMP N 7 Bandarlampung dapat dilihat sebagai berikut: Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pembelajaran adalah variabel guru. Guru mempunyai pengaruh yang cukup dominan terhadap kualitas pembelajaran, karena gurulah yang bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran di kelas, bahkan sebagai penyelenggara pendidikan disekolah. Berdasarkan hasil penelitian yang selama ini dilaksanakan, kompetensi guru SMP N 7 Bandar Lampung sudah dianggap baik dalam melaksanakan tugasnya, guru sudah dapat berfungsi sebagai pengajar, pelatih, pembimbing, dan sebagai

Rekomendasi

Setelah dilakukan analisis, maka rekomendasi yang perlu disampaikan kepada SMP Negeri 7 Bandar Lampung berkaitan dengan pelaksanaan program peningkatan kualitas pembelajaran adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi pelaksanaan otonomi pendidikan di lihat sarana prasarana yang ada di sekolah perlu dioptimalkan karena ada beberapa komponen yang belum mengikuti standar yang ditentukan. Optimalisasi dapat dilakukan dengan cara membuka sumber-sumber dana baru, misalnya melibatkan organisasi alumni.
2. Guna mempercepat tercapainya optimalisasi sarana prasarana pendidikan maka partisipasi sekolah yang saat ini sudah diwadahi ke dalam Komite Sekolah perlu ditingkatkan lagi peranannya.

Peningkatan peran dapat dilakukan dengan mengintensifkan pertemuan dan mengingatkan anggota - anggota yang jarang hadir dalam pertemuan untuk dapat berperan aktif dalam Komite Sekolah.

3. Pada dasarnya bentuk partisipasi masyarakat di SMP Negeri 7 Bandar Lampung dalam pelaksanaan program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan sudah dapat dikatakan cukup baik. Namun kiranya perlu dipertegas lagi bahwasanya tanggung jawab program peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan juga ada pada masyarakat. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk. Dengan memberikan sosialisasi aktif tentang program-program sekolah maka diharapkan Komite Sekolah tidak akan merasa ditinggalkan.

4. Pada dasarnya tingkat partisipasi masyarakat di SMP Negeri 7 Bandar Lampung sudah dapat dikatakan cukup baik. Karena terlihat adanya partisipasi aktif dari Komite Sekolah. Kepala Sekolah harus mampu mewadahi aspirasi masyarakat tersebut dengan cara melibatkan mereka secara penuh pada kegiatan-kegiatan yang bukan merupakan program dari pemerintah. Dengan demikian, Komite Sekolah akan merasa bahwa mereka benar-benar dibutuhkan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan di sekolah tersebut, karena mereka dilibatkan dari awal pengidentifikasian masalah, pembuatan program kerja hingga pelaksanaannya. Maka rasa memiliki dari Komite terhadap sekolah ini akan tertanam pada diri mereka yang pada gilirannya akan memancing mereka untuk

membuat ide-ide inovatif guna keberlangsungan sekolah ini menjadi sekolah yang tetap dianggap favorit oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, Cet ke-12.
- Marquardt, M.J. 2002. *Building the learning organization*. New York : McGraw-Hill
- Syafaruddin. 2008. *Efektivitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta. Rineka Cipta
- Senge, Peter M. 1990. *The fifth discipline: The art and practice of the learning organization*. New York: Doubleda
- Zamroni. 2008. *School Based Management*. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta.
- Zamroni. 2000. *Paradigma Pendidikan Masa Depan*. Yogyakarta Bigraf Publisng